

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2026

Oleh :

BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Menteri Supeno I No. 2, Semarang



URUSAN PEMERINTAHAN	:	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas / Balai / Cabang Dinas	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
A. Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Dukungan terhadap Indikator Program	:	Menyebarkan Program, Kebijakan, Pembangunan dan isu terkini di Jawa Tengah melalui advertorial TV Nasional, baliho acara besar, jasa pemotretan, sewa baliho dan advertorial media elektronik melalui konten kreator.
B. Sasaran	:	Masyarakat khususnya yang berada di Jawa Tengah.
C. Output Kegiatan		
1. Satuan	:	Media
2. Lokasi	:	Jawa Tengah
D. Latar Belakang	:	Media komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, kebijakan, serta program pembangunan kepada masyarakat. Keberadaan media publik, baik berupa media digital, cetak, maupun elektronik, menjadi sarana penting untuk menjamin keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pengelolaan serta pemanfaatan media komunikasi publik, baik yang dimiliki pemerintah maupun melalui kerja sama dengan media berbayar dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan, agar informasi publik dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui kegiatan produksi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan capaian pembangunan tersampaikan secara efektif dan berimbang.

Gambaran Kesenjangan

- : a. Belum tersebarluaskannya informasi kebijakan maupun program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat secara maksimal.
- b. Pemilihan media yang belum disesuaikan dengan perilaku konsumsi media di masyarakat pada suatu daerah.
- c. Belum semua media publikasi di manfaatkan secara maksimal.

E. Lingkup Kegiatan

- : a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
 - Maksud
Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran media dan pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara efektif, serta memastikan pengelolaan dan pemanfaatan media berbayar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tujuan
 1. Melakukan produksi dan diseminasi konten informasi publik yang akurat, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 2. Memanfaatkan media berbayar secara tepat dan sesuai petunjuk teknis untuk memperluas jangkauan publikasi kebijakan pemerintah.
 3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui penyebaran informasi yang cepat, kredibel, dan mudah diakses.
 4. Membangun citra positif pemerintah daerah sebagai lembaga publik yang informatif, responsif, dan transparan.
- b. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
 - Swakelola, *e-purchasing* dan pengadaan langsung
- d. Kebutuhan Waktu : 12 bulan
- e. Siapa yang terlibat : SKPD Pemprov Jateng, Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah, Media Televisi, Media Online.

F. Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

- 1. Kebutuhan Belanja Pegawai : Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli Bidang Komunikasi Publik dan Media
- 2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar :
 - Video Editor
 - Fotografer
 - Periset Konten
 - Perencana Konten
 - Reporter
 - Pranata Humas

3. Koordinasi	: Rencana Koordinasi : - Melakukan koordinasi dengan <i>leading</i> sektor kegiatan Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya menjadi bahan peliputan dan publikasi - Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait - Melakukan koordinasi kerjasama publikasi dengan media. Tujuan Koordinasi : a. SKPD Pemprov. Jateng dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk memperoleh informasi yang selanjutnya menjadi bahan publikasi b. Media (televisi, sosial, online) dan pihak penyedia jasa untuk membahas kerjasama publikasi Pihak yang terlibat dalam koordinasi : a. SKPD Pemprov. Jateng b. Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah c. Media (televisi, online, sosial), pihak penyedia jasa Frekuensi kebutuhan : 12 bulan
G. Keluaran/ Output	: Tersampainya kebijakan, hasil – hasil pembangunan, program dan isu terkini yang perlu di respon melalui advertorial TV Nasional, baliho acara besar, jasa pemotretan, sewa baliho dan advertorial media elektronik melalui konten kreator.
H. Hasil/ Outcome	: 1. Tersampainya informasi yang dikemas secara menarik di mdia sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas; 2. Tersampainya capaian dan kebijakan strategis daerah dalam program berita maupun advertorial di televisi nasional sehingga visibilitas daerah meningkat 3. Menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 4. Membuka keterlibatan masyarakat pada pembangunan dan mendapatkan respon masyarakat atas publikasi informasi yang dilakukan.
Kebutuhan Belanja Modal :	
1. Kebutuhan / dukungan alat / barang	- Belanja Barang/Jasa
2. Pengadaan tanah / lahan	- <i>(tidak ada)</i>
I. Anggaran	: Tahun 2026 : Rp 1.283.714.000,-
J. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Media	- Belanja Barang : Rp 2.000.000,- - Belanja Jasa : Rp 1.103.000.000,- - Belanja Perjalanan Dinas : Rp 178.714.000,-

K. Penutup

: Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Semarang, Januari 2026

Diketahui oleh :
Kepala Bidang
Komunikasi Publik dan Media



ENRICO ADRIAN RAMANDHA, SE, MM

Penata/Tingkat I (III/d)
NIP. 19870508 201001 1 011